

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki hak istimewa selain Aceh dan Papua, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai julukan sebagai kota pelajar yang dilatarbelakangi banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang berdiri di provinsi tersebut sehingga banyak sekali pelajar yang berasal dari luar daerah Yogyakarta sampai dengan luar pulau Jawa mengemban pendidikan, selain itu Yogyakarta juga tersohor dengan destinasi wisatanya yang kental akan budaya dan adat istiadat. Dengan alasan tersebut mengakibatkan Yogyakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kemajuan perkembangan dalam sektor fisik yang pesat, hal tersebut secara tidak langsung pada kawasan kota Yogyakarta yang juga sebagai pusat pemerintahan provinsi mengalami kemajuan perkembangan kota yang mengarah ke luar dan berdampak pada daerah lain di sekitarnya.

Kapanewon Depok Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan daerah kota Yogyakarta yang mana hal tersebut juga berdampak pada kemajuan perkembangan pembangunan fisik guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat beriringan dengan bertambahnya kepadatan penduduk itu sendiri dimana jumlah penduduk di Kapanewon Depok terhitung pada akhir tahun 2020 sejumlah 122.305 jiwa yang mana jumlah tersebut belum termasuk dengan para pelajar yang berdomisili di kawasan tersebut selama masa studi yang dijalani (BPS Kab. Sleman, 2020), selain itu Kapanewon Depok merupakan wilayah terpadat diantara Kapanewon lain yang ada di Kabupaten Sleman, hal tersebut dilansir pada website resmi daerah Kabupaten Sleman dimana kepadatan penduduk Kapanewon Depok sejumlah 3.069 jiwa/km² (Sleman, 2021).

Berdasarkan kepadatan penduduk tersebut juga berpengaruh terhadap kebutuhan hidup dari tiap individu yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan dimana hal tersebut menyebabkan pesatnya laju perkembangan pembangunan fisik di Kapanewon Depok, selain bangunan fisik yang kepemilikannya bersifat individu, terdapat banyak sarana prasarana publik baik instansi pemerintah, kesehatan, dan pendidikan yang mana di Kapanewon Depok sendiri untuk bangunan pada sektor pendidikan sejumlah 175 institusi pendidikan dari jenjang TK sampai dengan SMA dan sejumlah 64 institusi perguruan tinggi (Kapanewon Depok, 2019).

Dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Sleman dan kenyataan bahwa banyak institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi yang berdiri di kawasan Depok yang juga mengakibatkan masifnya pendatang yang berdomisili di Kapanewon Depok. Hal tersebut juga mengakibatkan masifnya pembangunan dan menimbulkan suatu isu yang berkaitan dengan kepadatan penduduk dan bangunan di suatu wilayah khususnya wilayah perkotaan yaitu ketersediaan unsur-unsur penghasil oksigen yang semakin berkurang diakibatkan alih fungsi lahan untuk pembangunan gedung baik perumahan penduduk yang bersifat individu atau gedung institusi dan prasarana publik.

Dengan adanya isu tersebut juga mengakibatkan isu lain seperti meningkatnya emosional masyarakat sampai dengan menurunnya lingkungan yang sehat untuk masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan permasalahan tersebut terdapat suatu jalan keluar yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan ketersediaan ruang terbuka untuk kegiatan luar ruangan bagi publik, ruang terbuka tersebut dapat diartikan sebagai suatu ruang yang secara sengaja atau direncanakan dengan alasan untuk kebutuhan tempat-tempat pertemuan dan kegiatan di area terbuka. Dengan adanya pertemuan dan interaksi dari sejumlah orang dimungkinkan akan terjadi berbagai macam kegiatan di ruang terbuka tersebut (Budiharjo dan D.Sujarto, 2005).

Upaya dalam menciptakan suatu kawasan perkotaan berkelanjutan yang mana dapat diartikan pembangunan di area perkotaan atau padat penduduk dapat

menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan. Salah satu program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat di tengah pembangunan fisik yang terus berlanjut adalah dengan adanya program Ruang Terbuka Hijau atau disebut dengan RTH. Ruang terbuka hijau sendiri merupakan suatu area atau kawasan dengan bentuk memanjang (jalur), dan/atau mengelompok yang mana penggunaannya bersifat terbuka, untuk area tumbuh tanaman baik tanaman yang tumbuh secara alami atau yang sengaja untuk ditanam (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, 2020).

Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dimana salah satu program yang diterapkan adalah dengan penyelenggaraan dan pengelolaan ruang terbuka hijau guna menciptakan lingkungan yang sehat khususnya pada penelitian ini adalah Kapanewon Depok. Adapun tantangan untuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ruang terbuka adalah terbatasnya lahan yang tersedia khususnya di kawasan perkotaan yang masif akan pembangunan fisik baik dari sektor privat ataupun institusi, terlebih di Kapanewon Depok merupakan kawasan yang banyak terdapat institusi pendidikan perguruan tinggi yang membutuhkan lahan yang cukup besar dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat terkait ekonomi seperti sewa kost dan penginapan untuk mahasiswa, kebutuhan untuk perdagangan dan lainnya. Adapun dalam upaya pengelolaan program ruang terbuka hijau, pemerintah daerah Kabupaten Sleman telah mengundang suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dimana ini menyangkut tentang ekologis seperti konservasi, pengaturan iklim mikro, produsen oksigen, penyerap polutan media udara, dan beberapa fungsi lain terkait pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Fungsi kedua adalah fungsi tambahan dimana berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi, estetika, sampai dengan pendidikan.

Sebagaimana dituliskan pada PERDA Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2020, terdapat dua jenis RTH menurut kepemilikannya yaitu RTH milik publik dan milik privat, hal tersebut juga lebih lanjut dijelaskan mengenai proporsi dari penyediaan RTH dimana perlu setidaknya minimal 30% dari keseluruhan luas wilayah suatu daerah perkotaan yang lebih lanjut dibagi menjadi dua pembagian tanggung jawab yaitu sebesar 20% RTH publik yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan 10% untuk RTH privat seperti perseorangan dan instansi atau kantor swasta pada kawasan perkotaan (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, 2020).

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Sleman memiliki suatu petunjuk dan dasar sampai dengan tolok ukur dalam penyelenggaraan program RTH khususnya di Kapanewon Depok yang mana hal tersebut juga menjadi pedoman bagi pihak pemerintah Kapanewon Depok dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan program penyelenggaraan RTH di kawasan Kapanewon Depok. Adapun dalam suatu implementasi kebijakan publik, hal yang menjadi paling penting dalam pengukuran suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau tidak salah satunya adalah apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak bagi kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

Telah banyak literatur penelitian yang telah membahas terkait implementasi kebijakan tentang pengelolaan program Ruang Terbuka Hijau yang berfokus pada bagaimana dan sejauh mana suatu kebijakan dijalankan atau diimplementasikan oleh aktor-aktor implementasi suatu kebijakan, karena hal tersebut peneliti fokus dalam mengetahui bagaimana atau sejauh mana implementasi kebijakan dalam hal ini adalah PERDA Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 dijalankan dan apa yang menjadi faktor pendukung dan/atau penghambat implementasi kebijakan tersebut yang mana subjek dari penelitian ini adalah para aktor atau implementor kebijakan di sektor pemerintahan yaitu Kapanewon Depok dan 3 Desa yang ada di bawah naungan Kapanewon Depok tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian **"Implementasi**

Kebijakan Pengelolaan Program Ruang Terbuka Hijau Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Sehat di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan program ruang terbuka hijau di wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan/atau penghambat dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan program ruang terbuka hijau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan program ruang terbuka hijau di wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan/atau penghambat dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan program ruang terbuka hijau?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritik dan praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritik, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat untuk :

- a. Menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengembangan

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa
Ikut serta dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan fokus dari penelitian untuk Kapanewon Depok dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
- b. Bagi Kapanewon Depok
Dapat menjadi bahan evaluasi, pemecahan masalah baik dari pihak perangkat kantor Kapanewon Depok, pengurus lembaga kemasyarakatan sampai dengan masyarakat Kapanewon Depok.
- c. Bagi Universitas Amikom Yogyakarta
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk Universitas khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan mengenai topik Pengelolaan Program Ruang Terbuka Hijau, dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis di kemudian hari.

1.5 Sistematika Bab

Dalam penyusunan penelitian atau skripsi ini terdapat sistematika penulisan antara lain :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang coba dibahas dalam penelitian, rumusan masalah yang coba diangkat dalam penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan baik teoritis dan praktis, serta menjelaskan terkait sistematika penulisan dalam skripsi yang ditulis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian baik teori utama dan teori pendukung, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, kerangka pemikiran sebagai pedoman penelitian

yang dilakukan, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan awal dari permasalahan yang dibahas sebelum akhirnya mendapatkan kesimpulan akhir.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan, teknik analisis data, sampai dengan variabel penelitian yang dibutuhkan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil dari pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan serta terdapat pembahasan dari analisis data yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu mengenai pengaruh dari implementasi kebijakan pengelolaan program Ruang Terbuka Hijau terhadap terwujudnya lingkungan hidup yang sehat di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari hasil dan pembahasan data dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta adanya saran atau agenda penelitian lanjutan yang penting untuk dilakukan.